

CALK

(Catatan Atas Laporan Keuangan)

BAB I

PENDAHULUAN

Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan hukum yang mendasari untuk dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Keuangan pada Kantor Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk dimaksudkan untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 10 huruf k yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Kepala OPD sebagai Pengguna Anggaran/Barang adalah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan OPD yang dipimpinnya dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

Laporan Keuangan Kecamatan Ngluyu Tahun 2022 ini disusun mencakup seluruh komponen yaitu : **Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).**

Laporan Realisasi Anggaran yang mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah Daerah mengklasifikasikan aset dalam aset lancar dan aset non lancar, Kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Laporan Operasional menyajikan pendapatan-LO dari kegiatan operasional, Beban dari kegiatan operasional, Surplus/defisit dari operasi, Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa dan surplus/difisit – LO.

Laporan perubahan ekuitas menyajikan ekuitas awal, surplus/difisit-LO, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, ekuitas akhir.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan .

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Ngluyu Tahun 2022 sebagaimana uraian berikut :

1.1.1 Maksud

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (*good governance*) dengan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 yang dapat dimanfaatkan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber dana.

1.1.2 . Tujuan

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 bertujuan untuk :

- a. Menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan dana APBD Tahun 2022 untuk membiayai seluruh pengeluaran pada Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk ;
- b. Menyajikan informasi mengenai jumlah sumber daya keuangan yang digunakan dalam kegiatan Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk ;
- c. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran dana pemerintah yang ada pada Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk ;

- d. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan perubahan posisi keuangan pada Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk ;
- e. Menyajikan informasi mengenai kinerja keuangan Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan Kinerja Instansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual pada Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 ;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 disusun dalam 5 (Lima) bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.

3.1.1. Pendapatan – LRA

3.1.2. Belanja.

3.1.3. Pendapatan - LO

3.1.4. Beban

3.1.5. Aset

3.1.6. Kewajiban

3.1.7. Ekuitas Dana

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN KECAMATAN NGLUYU.

BAB V PENUTUP

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan.

Secara umum kondisi perekonomian Kabupaten Nganjuk pada tahun 2022 dalam kondisi stabil, dalam artian pertumbuhan di berbagai sektor perekonomian merupakan peningkatan dari aspek eksternal maupun internal sebagai pendukung kestabilan ekonomi, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, kebijakan fiskal daerah, situasi moneter dan kondisi ekonomi makro nasional dan regional. Walaupun Optimisme perekonomian Kabupaten Nganjuk di tahun-tahun mendatang sangat beralasan, hal ini dapat dilihat dari perkembangan perekonomian tiap tahunnya menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Dampak pandemi COVID-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan. Pandemi Covid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan. Kondisi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan upaya dalam pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mendorong investasi dan ekspor non-migas termasuk dengan meningkatkan koordinasi antara kebijakan fiskal dan sektor riil akan meningkatkan peranan masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Kuantitas belanja Perangkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari bagian sistem APBD berbasis kinerja. Struktur belanja daerah yang tercantum pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja.

Ditinjau dari komposisi belanja maka Kecamatan Ngluyu terdiri dari 2 belanja yaitu :

a. Belanja tidak langsung.

Belanja tidak langsung merupakan belanja pegawai yang meliputi :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Gaji dan tunjangan		
Belanja gaji pokok PNS/uang representasi	484.255.574	352.830.200
Belanja Tunjangan keluarga	49.502.460	37.391.264
Belanja Tunjangan jabatan	60.200.000	42.760.000
Belanja Tunjangan fungsional umum	7.560.000	7.560.000
Belanja tunjangan beras	26.071.200	19.118.880
Belanja tunjangan PPH/tunjangan khusus	3.085.894	2.594.667
Belanja pembulatan gaji	5.028	5.540
Belanja iuran jaminan kesehatan	30.382.870	32.458.100
Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja	1.107.400	725.996
Belanja Jaminan Kematian	3.319.092	2.177.984
Belanja Tapera	6.280.584	0
Belanja Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	684.903.446	466.468.353
J U M L A H	1.356.673.548	964.090.984

b. Belanja Langsung.

Belanja langsung meliputi :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.649.162.687	1.177.640.950
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	65.033.800	26.576.250
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	50.596.50	23.891.000
Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	27.900.000	9.525.000
Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	37.470.000	11.147.500
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	143.792.000	110.546.250
Jumlah	1.973.954.987	1.359.326.950

Secara garis besar dikelompokkan menjadi belanja operasi dan belanja modal, berikut ini tabel perbandingan realisasi belanja TA 2022 dan 2021.

Uraian	TA 2022		TA 2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)
BELANJA	1.973.954.987	1.359.326.950	917.424.957
Belanja Operasi	1.927.899.948	1.324.815.200	917.424.957
Belanja Modal	46.055.039	34.511.750	0
J U M L A H	1.973.954.987	1.359.326.950	917.424.957

Pencapaian kinerja tidak hanya dilihat dari entitas pelaporan dari sisi perubahan aset bersih saja, namun juga dilihat pula dari perbandingan antara kinerja terhadap target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian kinerja dapat diketahui berdasarkan tingkat efisiensi dan efektifitas suatu program.

Pencapaian kinerja TA 2022 yang tertuang dalam 6 (enam) program dengan anggaran sebesar Rp1.973.954.987,00 terealisasi sebesar Rp1.359.326.950,00 atau 68.86 %, dengan rincian program sebagaimana tabel berikut:

NO	URAIAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.649.162.687	1.177.640.950	71.40
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	65.033.800	26.576.250	40.31
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	50.596.500	23.891.000	47.21
4	Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum	27.900.000	9.525.000	34.13
5	Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum	37.470.000	11.147.500	30.00
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	143.792.000	110.546.250	76.87
Jumlah		1.973.954.987	1.359.326.950	68.86

Melihat tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan dan ada sebagian yang belum memenuhi target kinerja yang telah ditentukan dikarenakan adanya beberapa kendala dan hambatan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan.

Rencana program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan di Kecamatan Ngluyu tahun anggaran 2022 diprioritaskan pada bidang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun rincian program dan pencapaiannya sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp1.649.162.687,00 terealisasi sebesar Rp1.177.640.950,00 atau 71.40 %. Program ini meliputi kegiatan :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran sebesar Rp2.000.000,00
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dengan anggaran sebesar Rp1.356.673.548,00
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran sebesar Rp16.321.000,00
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan bahan logistik kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD dengan anggaran sebesar Rp82.680.300,00
- e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan sub kegiatan Pengadaan mebel, Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran sebesar Rp46.055.039,00

- f. Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan daerah dengan sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan anggaran sebesar Rp26.250.000
- g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, *Pemeliharaan Mebel*, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran sebesar Rp115.182.800,00

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.

Program ini dengan anggaran sebesar Rp65.033.800,00 terealisasi sebesar Rp26.576.250,00 atau 40.31 %. Meliputi kegiatan :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan anggaran sebesar Rp59.804.300,00
- b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum dengan sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum dengan anggaran sebesar Rp5.229.500,00

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Program dengan anggaran sebesar Rp50.596.500,00 terealisasi sebesar Rp23.891.000,00 atau 47,21 %. Yang meliputi kegiatan :

- Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa, dengan anggaran sebesar Rp25.362.600,00
- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan, dengan anggaran sebesar Rp25.233.900,00

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program ini dengan anggaran sebesar Rp27.900.000,00 terealisasi sebesar Rp9.525.000,00 atau 34,13 %. Meliputi kegiatan :

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan sub kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Program ini dengan anggaran sebesar Rp37.470.000,00 terealisasi sebesar Rp11.147.500,00 atau 30,00 %. Meliputi kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Program ini dengan anggaran sebesar Rp143.792.000,00 terealisasi sebesar Rp110.546.250,00 atau sebesar 76,87 % Meliputi kegiatan :

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Walaupun total penyerapan dana belum sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, tetapi kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. Beberapa hambatan dan kendala yang menyebabkan dalam pencapaian target kurang dari 100% diantaranya :

1. Pertimbangan efisiensi anggaran dan keterbatasan Tupoksi;
2. Koordinasi dengan instansi terkait yang masih kurang;
3. Waktu yang terbatas dan berbenturan dengan kegiatan lain;

4. Adanya anggaran kegiatan yang salah kode rekening dalam pengentrian di sistem sehingga tidak dapat diserap
5. Kekosongan jabatan eselon IVa dimana dalam ini selalu PPTK
6. Minimnya jumlah personil pelaksana kegiatan sehingga merangkap sebagai PPTK sehingga ada kegiatan yang belum terlaksana dengan maksimal.

BAB III
PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

3.1. Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan Realisasi anggaran merupakan perbandingan antara realisasi pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.

3.1.1. Pendapatan

Kecamatan Ngluyu bukan merupakan unit penghasil sehingga tidak ada pendapatan.

3.1.2. Belanja

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp1.359.326.950,00 atau 68,86 % dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.973.954.987,00 Rincian belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Rp.	Realisasi		
			Rp	% Anggaran	% Total
1	Belanja Operasi	1.927.899.948	1.324.815.200	68,71	97,66
2	Belanja Modal	46.055.039	34.511.750	74,94	2,54
Jumlah Belanja		1.973.954.987	1.359.326.950	68,86	

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dapat direalisasikan sebesar Rp1.324.815.200,00 atau 68,72 % dari rencana yang sebesar Rp1.927.899.948,00 Rincian belanja operasi sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Rp.	Realisasi		
			Rp	% Anggaran	% Total
1	Belanja Pegawai	1.378.273.548	984.190.984	71,41	71.49
2	Belanja Barang & Jasa	549.626.400	340.624.216	61,97	25,75
Jumlah Belanja Operasi		1.927.899.948	1.324.815.200	68,72	

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp984.190.984,00 atau 74.28 % dari total realisasi Belanja Operasi.

Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan	497.622.631
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	466.468.353
Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN	20.100.000
Jumlah	984.190.984

b. Belanja Barang dan jasa.

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pengadaan barang-barang dan jasa yang digunakan dalam masa satu tahun anggaran operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp340.624.216,00 Atau 25,75 % dari total Belanja Operasi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)
Belanja Bahan Pakai Habis	132.333.865
Belanja Jasa Kantor	121.699.256
Belanja Iuran jaminan/ Asuransi	638.595
Belanja Sewa Peralatan dan mesin	18.400.000
Belanja Perjalanan Dinas	38.460.000
Belanja Pemeliharaan	6.092.500
Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat	23.000.000
Jumlah	340.624.216

2. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp34.511.750,00 atau 74,94 % dari anggaran sebesar Rp46.055.039,00 Rincian Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran Rp.	Realisasi		
			Rp	% Anggaran	% Total
1	Belanja Tanah	0	0	0	0
2	Belanja Peralatan dan Mesin	46.055.039	34.511.750	74,94	74,94
3	Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
6	Belanja Aset Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Belanja Modal		46.055.039	34.511.750	74,94	74,94

a. Belanja Tanah

Belanja tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Realisasi belanja tanah tahun 2022 sebesar Rp0,00 atau tidak ada penambahan belanja.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin, mencakup belanja modal pengadaan alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan di air bermotor, alat-alat bengkel, alat-alat pengolahan pertanian dan

perternakan, peralatan kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, peralatan dan perlengkapan olah raga. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp34.511.750,00 atau mempunyai porsi sebesar 74,94.% dari anggaran Belanja Modal.

Rincian belanja peralatan dan mesin TA 2022 adalah sebagai berikut ;

Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)
Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0
Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	0
Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	0
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0
Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	6.382.500
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	0
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0
Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara	0
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0
Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0
Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	0
Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	0
Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	18.041.750
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	10.087.500
Belanja modal Pengadaan Komputer	0
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0
Belanja modal Pengadaan Alat Studio	0
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	0
Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	0
Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	0
Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	0
Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0
Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0
Belanja modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0

Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	0
Belanja modal Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	0
Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0
Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0
Belanja modal Pengadaan Senjata Api	0
Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api	0
Belanja modal Pengadaan Amunisi	0
Belanja modal Pengadaan Senjata Sinar	0
Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0
Jumlah	34.511.750

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang dipakai dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi yang siap pakai antara lain gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas, gudang, monumen, tower/menara, bangunan bersejarah, tugu peringatan dan fasilitas umum lainnya. Realisasi belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp0,00 atau tidak ada penambahan belanja .

d. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup biaya yang dikeluarkan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap pakai. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp0,00 atau tidak ada penambahan belanja.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset tetap Lainnya mencakup biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Realisasi belanja aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2022 mencapai Rp0,00 atau tidak ada penambahan belanja.

3.2. Laporan Operasional

3.2.1. Pendapatan - LO

Pada Laporan Operasional (LO) Kecamatan Ngluyu tidak terdapat pos pendapatan, hal ini dikarenakan Kecamatan Ngluyu bukan merupakan Perangkat Daerah penghasil pendapatan.

3.2.1. Beban Operasi

Beban Operasi Tahun 2022 mencapai Rp1.453.419.580,00
Rincian beban tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Uraian	Realiasi Tahun 2022 Rp.
1	Beban Pegawai	984.190.984
2	Beban Barang dan jasa	347.369.826
3	Beban Bunga	0
4	Beban Subsidi	0
5	Beban Hibah	0
6	Beban Bantuan Sosial	0
7	Beban Penyisihan Piutang	0
8	Beban Lain-lain	0
9	Beban penyusutan peralatan dan mesin	70.355.000
10	Beban penyusutan gedung dan bangunan	51.008.720
11	Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi	495.050
12	Beban penyusutan aset tetap lainnya	0
13	Beban penyusutan aset lainnya	0
14	Beban amortisasi aset tidak berwujud	0
15	Beban bagi hasil	0
16	Beban bantuan keuangan	0
Jumlah		1.453.419.580

1. Beban Pegawai

Uraian	Realiasi Tahun 2022 Rp.
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	497.622.631
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	466.468.353
Beban Honorarium PNS - LO	20.100.000
Jumlah	984.190.984

2. Beban Barang dan jasa

Uraian	Realiasi Tahun 2022 Rp.
Beban Bahan Pakai Habis	132.333.865
Beban Jasa Kantor	128.444.866
Beban Iuran jaminan/Asuransi	638.595
Beban Sewa Peralatan dan mesin	18.400.000
Beban Perjalanan Dinas	38.460.000
Beban Pemeliharaan Peralatan dan mesin	6.092.500
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat	23.000.000
Jumlah	347.369.826

3. *Beban Penyusutan dan Amortisasi*

No	Uraian	Realiasi Tahun 2022 Rp.
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	70.355.000
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	51.008.720
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	495.050
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0
	Jumlah	121.858.770

3.3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas SKPD. Ekuitas akhir per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp692.771.433,00 yang terdiri dari:

- Penambahan ekuitas awal atau saldo ekuitas per 31 Desember 2021, yaitu sebesar Rp786.864.063,00
- Surplus/Defisit- LO sebesar Rp(1.453.419.580,00),
- Dampak kumulatif perubahan kebijakan sebesar Rp0,00
- Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp1.359.326.950,00

3.4. Neraca

5.4.1. Aset

Aset adalah merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dengan satuan uang yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

A. Aset Lancar

Diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu satu tahun anggaran.

Aset Lancar per 31 Desember 2022 terdiri dari :

Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	0,00
Piutang Pajak/Retribusi	Rp.	0,00
Piutang Lain-lain	Rp.	0,00
Sewa Dibayar Dimuka	Rp.	0,00
Asuransi Dibayar Dimuka	Rp.	0,00
Persediaan	Rp.	0,00
Total Aset Lancar	Rp.	0,00

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa uang persediaan tahun 2022 yang belum disetor ke Kas Daerah.

2. Persediaan

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021	0,00	0,00

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Kecamatan Ngluyu dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. Nilai persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Persediaan Barang Pakai Habis

1) Persediaan Alat Tulis Kantor

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	NIHIL	
2		
Jumlah		

2) Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	NIHIL	
2		
Jumlah		

3) Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	NIHIL	
2		
Jumlah		

4) Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	NIHIL	
2		
Jumlah		

B. Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tidak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintahan.

Aset Tidak Lancar terdiri dari:

Uraian	Rp
1. Aset Tetap	699.494.030
2. Aset Lainnya	0
Jumlah Aset Tidak Lancar	699.494.030

1. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2022 sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Uraian	Saldo Aset Tetap berdasarkan Neraca per 31 Des 2021 Rp.	Realisasi Belanja Modal TA 2022 Rp.	Penyesuaian Nilai Rp.	Saldo Aset Tetap per 31 Des 2022 setelah penyesuaian Rp.
1	Tanah	4.771.000	0	0	4.771.000
2	Peralatan dan Mesin	781.084.836	34.511.750	6.702.000	808.894.586
3	Gedung dan Bangunan	1.187.274.400	0	0	1.187.274.400
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.901.000	0	0	9.901.000
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
	JUMLAH	793.543.050	34.511.750	6.702.000	699.494.030

Rincian aset tetap disajikan sebagai berikut:

a. Tanah

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Merupakan saldo Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021.	4.771.000	4.771.000

Tanah dengan rincian sebagai berikut:.

Uraian	Rp
• Saldo Awal	4.771.000
• Penambahan nilai aset tetap Tanah terdiri dari:	0
- Belanja modal tahun 2022	0
- Hibah	0
- Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	0
- Reklasifikasi dari KDP	0
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	0
- Mutasi antar SKPD	0
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0
• Pengurangan aset tetap Tanah terdiri dari:	0
- Hibah	0
- Barang pakai habis	0
- Barang dan Jasa	0
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	0
- Reklasifikasi ke KDP	0
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	0
- Mutasi antar SKPD	0
- Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi	0
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	0
- Penyusutan	0
- Penghapusan	0
Saldo akhir setelah penyesuaian	4.771.000

b. Peralatan dan Mesin

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021.	808.894.586	781.084.836

Peralatan dan Mesin terdiri dari:

1) Alat-alat Berat

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Berat per 31 Desember 2022 dan 2021.	7.950.000	7.950.000

2) Alat-alat Angkutan

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Merupakan saldo Alat-Alat Angkutan per 31 Desember 2022 dan 2021.	423.352.300	416.969.800

Alat-alat Angkutan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	416.969.800
• Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Angkutan terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2022	6.382.500
- Hibah	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar Aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPD	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
• Pengurangan aset tetap Alat-alat Angkutan terdiri dari:	
- Hibah	
- Barang pakai habis	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar Aset Tetap	
- Reklasifikasi ke KDP	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPD	
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	
- Penyusutan	
- Penghapusan	
Saldo akhir setelah penyesuaian	423.352.300

3) Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Merupakan saldo Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2022 dan 2021.	143.692.000	122.264.750

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	122.264.750
• Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2022	21.427.250
- Hibah	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPD	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
• Pengurangan aset tetap Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga terdiri dari:	
- Hibah	
- Barang pakai habis	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke KDP	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPD	
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	
- Reklas ke Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penghapusan	
-	
Saldo akhir setelah penyesuaian	143.692.000

c. Gedung dan Bangunan

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Merupakan saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021.	1.187.274.400	1.187.274.400

Gedung dan Bangunan terdiri dari:

1) Bangunan Gedung

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Merupakan saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2022 dan 2021.	1.187.274.400	1.187.274.400

Bangunan Gedung dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	1.187.274.400
• Penambahan nilai aset tetap Bangunan Gedung terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2022	
- Hibah	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dar Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPD	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
• Pengurangan aset tetap Bangunan Gedung terdiri dari:	
- Hibah	
- Barang pakai habis	
- Barang dan Jasa	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke KDP	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPD	
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penghapusan	
Saldo akhir setelah penyesuaian	1.187.274.400

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Merupakan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021.	9.901.000	9.901.000

1) Instalasi

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Merupakan saldo Instalasi per 31 Desember 2022 dan 2021.	9.901.000	9.901.000

Instalasi dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
• Saldo Awal	9.901.000
• Penambahan nilai aset tetap Instalasi terdiri dari:	
- Belanja modal tahun 2022	
- Hibah	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi dari KDP	
- Reklasifikasi dari Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPD	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
• Pengurangan aset tetap Instalasi terdiri dari:	
- Hibah	
- Reklasifikasi antar aset tetap	
- Reklasifikasi ke KDP	
- Reklasifikasi ke Aset Lainnya	
- Mutasi antar SKPD	
- Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	
- Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset	
- Penyusutan	
- Penghapusan	
-	
Saldo akhir setelah penyesuaian	9.901.000

e. Aset Tetap Lainnya

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021.	0,00	0,00

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Merupakan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021.	0,00	0,00

g. Akumulasi Penyusutan

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Merupakan saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021.	(1.311.346.956)	(1.189.488.186)

Akumulasi Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
- Peralatan dan Mesin	731.089.036
- Bangunan dan Gedung	570.912.370
- Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.445.550
- Aset tetap lainnya	3.900.000
Saldo akhir setelah penyesuaian	1.311.346.956

3.4.2. Kewajiban

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat timbul dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, dan kewajiban pemerintah yang timbul dari keharusan membayar kembali pinjaman.

Uraian	Per 31 Desember 2022 (Rp)	Per 31 Desember 2021 (Rp)
Merupakan saldo dari Kewajiban per 31 Desember 2022 dan 2021.	6.722.597	6.678.987

Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.722.597,00 Terdiri dari:

- a. Utang Belanja listrik sebesar Rp337.147,00
- b. Utang Belanja Internet sebesar Rp385.450,00
- c. Utang Belanja jasa tenaga kebersihan sebesar Rp1.200.000,00
- d. Utang Belanja jasa tenaga keamanan sebesar Rp3.600.000,00
- e. Utang Belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp1.200.000,00

3.4.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan.

Saldo ekuitas pada neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas jumlah ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp692.771.433,00

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
PADA KECAMATAN NGLUYU

Pos Pelaporan Non Keuangan OPD Kec. Ngluyu meliputi :

4.1. Domisili dan bentuk hukum

Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk terletak di Jalan Mayjend. Sungkono No. 2 Telepon 0358 611785 Ngluyu Kabupaten Nganjuk. Organisasi ini disebut Kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan pada Pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa Kecamatan Ngluyu adalah Kecamatan dengan Tipe A.

4.2 Tugas pokok dan fungsi

Pemerintah Kecamatan Ngluyu mempunyai tugas pokok melaksanakan, memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah yang ada di Kecamatan Ngluyu dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan di desa dalam wilayah Kecamatan Ngluyu.

Pemerintah Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
2. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
3. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
5. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
6. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
8. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan

9. Pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
10. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

4.3 Susunan Organisasi.

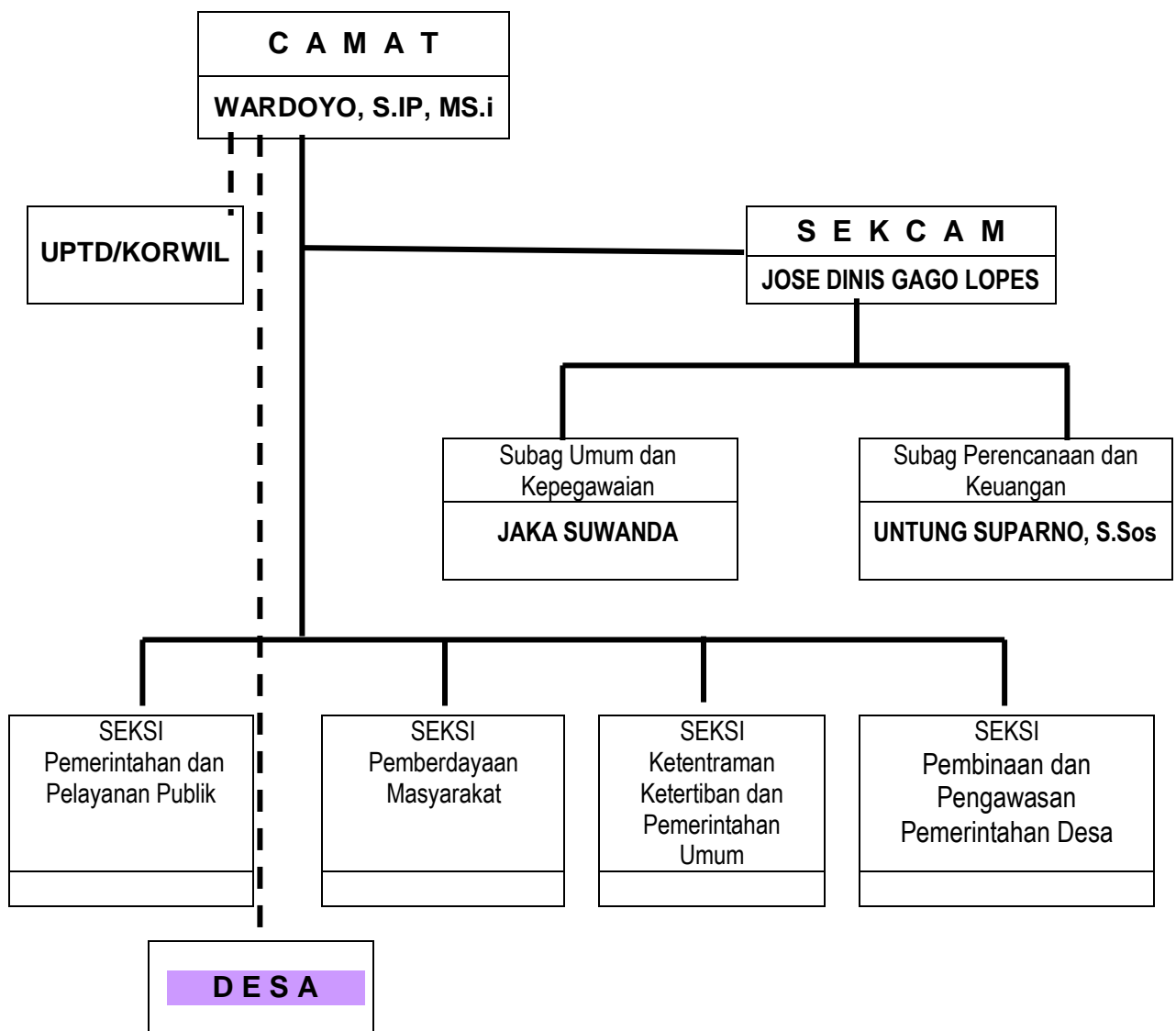
Pemerintah Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk dikepalai oleh seorang CAMAT yang membawahi :

- a. Sekretariat dikepalai Sekretaris Kecamatan

Terdiri dari :

- Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- b. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum
 - e. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - f. UPT Dinas/Korwil terdiri dari :
 - Balai Penyuluh KB
 - Puskesmas
 - Korwil Pendidikan
 - Balai Penyuluh Pertanian
 - UPTD SMPN I Ngluyu

**SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH KECAMATAN NGLUYU**
(Berdasarkan Perda Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020)



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut :

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

11. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
12. Pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
13. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
14. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
15. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
16. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
17. Pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
18. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
19. Pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
2. pengelolaan urusan keuangan;
3. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
4. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
 - a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
 - b) melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - c) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
 - d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
- d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
- e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengoordinasian/persinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
- b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- c. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- d. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- e. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- f. melaksanakan pengoordinasian/persinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
- g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
- i. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;
- b. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
- c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
- d. melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
- e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- f. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum

Seksi Ketentraman Ketertibandan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
- b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- d. melaksanakan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
- e. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- f. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;

- g. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- h. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- j. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
- k. melaksanakan tugas Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas:

- a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa ;
- h. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- i. melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
- j. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- k. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;

- l. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- m. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
- n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.4. Sumber Daya Perangkat Daerah

4.4.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Ngluyu adalah sebagai berikut:

4.4.1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Ngluyu sebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 4 (empat) jabatan struktural dan 4 (empat) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 3 (tiga) orang pelaksana dan 5 orang Non ASN, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.4.1.
Pegawai Pada Kecamatan Ngluyu
Berdasarkan Jabatan Tahun 2022

No.	Nama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat	1		1
2.	Sekretaris Kecamatan	1		1
3.	Kepala Seksi	0		0
4.	Kasubbag	2		2
5.	Pelaksana/PNS	1	2	3
6.	Non ASN	4	1	5
Jumlah		9	3	12

4.4.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Ngluyu sebagai berikut :

Tabel 4.4.2.
Pegawai Pada Kecamatan Ngluyu
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun 2022

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tk.1	IV/b	0	0	0
2.	Pembina	IV/a	1	0	1
3.	Penata Tingkat I	III/d	2	0	2
4.	Penata, III/c	III/c	1	0	1
5.	Penata Muda Tk. I	III/b	0	0	0
6.	Pengatur Tk I	II/d	0	1	1
7.	Pengatur	II/c	1	0	1
8.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	0	1	1
Jumlah			5	2	7

4.4.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pegawai Kecamatan Ngluyu dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidkat sebagai berikut :

Tabel 4.4.3
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Ngluyu
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir Tahun 2022

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	1	0	1
2.	S1	2	1	3
3.	D3	0	0	0
4.	SMA	2	1	3
Jumlah		5	2	7

4.4.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:

3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
- Roda empat sebanyak 1 (satu) buah terdiri dari :
 - 1 unit Daihatsu Panther Tahun 2013
 - Roda dua sebanyak 3 (tiga) unit yaitu :
 - Honda Supra X125 Tahun 2007
 - Yamaha Vixion Tahun 2014
4. Peralatan inventaris kantor lainnya sebagai berikut :
- Meja Kerja : 20 buah
 - Meja layanan : 1 buah
 - Kursi : 100 buah
 - Bangku Panjang : 3 buah
 - Komputer khusus KTP SIAK 1 (satu) unit
 - Komputer e-KTP : 2 unit (depdagri)
 - Komputer : 5 unit
 - Laptop : 3 unit
 - Mesin Ketik : 1 buah
 - Printer : 5 unit
 - Telepon/internet : 1 unit
 - Rak/lemari : 8 unit
 - Felling cabinet : 4 unit

BAB V
PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 ini disusun semoga informasi – informasi yang disajikan bermanfaat bagi pengguna dan pimpinan dalam pengambilan keputusan yang akan datang. Laporan keuangan dibuat untuk dapatnya dipakai dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas Kecamatan Ngluyu sebagai entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan.

Ngluyu, 18 Januari 2023

CAMAT NGLUYU

Sebagai Pengguna Anggaran



WARDOYO, S.IP, M.Si

Pembina

NIP. 197509071996021002

